



*Rudy C Tarumingkeng: Hari Pendidikan Nasional: Partisipasi Semesta
untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu bagi Semua*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

2 Mei 2026

HARI PENDIDIKAN NASIONAL: PARTISIPASI SEMESTA UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERMUTU BAGI SEMUA

Abstrak

Tema resmi Hardiknas 2025 adalah **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,”** sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui pedoman peringatan Hardiknas. Tema tersebut menegaskan bahwa pendidikan bermutu tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, sekolah, atau guru, melainkan harus menjadi gerakan kolektif seluruh unsur bangsa: keluarga, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, organisasi keagamaan, komunitas lokal, pemerintah daerah, dan peserta didik sendiri. ([ChatGPT](#))

Makalah ini membahas Hardiknas dalam perspektif sejarah, filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara, tantangan mutu pendidikan nasional, kesenjangan akses dan kualitas, peran kepemimpinan sekolah, pentingnya literasi digital, dan transformasi pendidikan di era kecerdasan buatan. Kajian ini juga menempatkan pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia, demokrasi, ekonomi kreatif, dan peradaban bangsa. Data internasional seperti PISA dan laporan UNESCO digunakan sebagai pembandingan untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam literasi, numerasi, sains, kepemimpinan pendidikan, dan pemerataan mutu. Hasil kajian menegaskan bahwa “partisipasi semesta” perlu diterjemahkan ke dalam tata kelola kolaboratif,

pembelajaran bermakna, penguatan karakter, pemanfaatan teknologi secara etis, serta komitmen jangka panjang untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan kebudayaan nasional.

Kata kunci: *Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, partisipasi semesta, pendidikan bermutu, Ki Hadjar Dewantara, transformasi pendidikan, literasi digital, kepemimpinan pendidikan.*

Hari Pendidikan Nasional: Partisipasi Semesta untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu bagi Semua

1. Pendahuluan

Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Ia adalah ruang refleksi kebangsaan mengenai arah, makna, dan masa depan pendidikan Indonesia. peringatan Hardiknas memperoleh bobot strategis karena tema yang diangkat, yaitu **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”** Tema ini mengandung pesan yang kuat: pendidikan bukan proyek sektoral, melainkan proyek peradaban. Pendidikan bukan hanya urusan kementerian, sekolah, kepala sekolah, atau guru; pendidikan adalah tugas kolektif seluruh bangsa.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 melalui Surat Edaran Nomor 7441/MDM.A/TU.02.03/2025 yang ditandatangani pada 24 April 2025. Pedoman tersebut memuat ketentuan umum, pelaksanaan upacara bendera, serta ragam aktivitas Hardiknas 2025. Dalam pedoman itu ditegaskan bahwa tema Hardiknas 2025 adalah “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” ([Kemendikdasmen](#))

Tema ini dapat dibaca sebagai ajakan moral sekaligus agenda kebijakan. Sebagai ajakan moral, ia mengingatkan bahwa mutu pendidikan tidak akan lahir dari sistem yang bekerja sendiri-sendiri. Sebagai agenda kebijakan, ia menuntut adanya sinergi antara negara, sekolah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, teknologi, dan komunitas lokal. Pendidikan bermutu bukan hanya tentang tersedianya ruang kelas dan kurikulum, tetapi juga tentang kualitas relasi antara guru dan murid, relevansi pembelajaran dengan kehidupan, pemerataan kesempatan, integritas tata kelola, serta kemampuan sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Dalam sejarah Indonesia, pendidikan selalu memiliki dimensi pembebasan. Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam pandangan ini, pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan pembentukan manusia yang merdeka, beradab, kreatif, bertanggung jawab, dan mampu hidup dalam kebersamaan sosial.

Hardiknas perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Indonesia sedang menghadapi dunia yang berubah cepat: digitalisasi, kecerdasan buatan, disrupsi pekerjaan, perubahan iklim, ketimpangan sosial, urbanisasi, migrasi, dan krisis nilai. Pendidikan tidak lagi cukup hanya menyiapkan manusia untuk menghafal informasi. Pendidikan harus menyiapkan manusia untuk berpikir kritis, berkolaborasi, berinovasi, menjaga etika, dan beradaptasi dalam lingkungan yang kompleks. Dalam bahasa manajemen modern, pendidikan harus membangun **human capability**, bukan sekadar **human resource**.

Makalah ini menguraikan makna Hardiknas dalam kerangka akademik dan reflektif. Pembahasan dimulai dari makna historis Hari Pendidikan Nasional, dilanjutkan dengan telaah tema "partisipasi semesta," analisis tantangan mutu pendidikan Indonesia, peran keluarga dan masyarakat,

kepemimpinan sekolah, transformasi digital, pendidikan karakter, serta rekomendasi strategis untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua.

2. Makna Historis Hari Pendidikan Nasional

Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei untuk mengenang kelahiran Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan nasional yang pemikirannya menjadi fondasi penting bagi pendidikan Indonesia. Ki Hadjar Dewantara bukan hanya seorang pendidik, melainkan pemikir kebudayaan, pejuang kemerdekaan, dan arsitek pendidikan yang menempatkan manusia sebagai pusat proses belajar. Gagasan terkenalnya, **“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangukarsa, tut wuri handayani,”** bukan hanya slogan, tetapi filsafat kepemimpinan pendidikan.

Ungkapan tersebut dapat dimaknai dalam tiga lapis. Pertama, di depan seorang pendidik harus memberi teladan. Pendidikan tidak hanya berlangsung melalui kata-kata, tetapi melalui contoh hidup. Guru yang disiplin, jujur, terbuka, dan penuh kasih secara tidak langsung membentuk karakter murid. Kedua, di tengah peserta didik, pendidik membangun kehendak dan semangat. Guru bukan penguasa kelas, melainkan fasilitator yang menghidupkan rasa ingin tahu. Ketiga, dari belakang pendidik memberi dorongan. Pendidikan yang baik memberi ruang bagi kemandirian anak, bukan menciptakan ketergantungan.

Dalam kerangka ini, Hardiknas bukan sekadar perayaan administratif. Ia adalah momentum untuk bertanya: apakah pendidikan kita masih menuntun anak menuju kemerdekaan batin, kecerdasan, dan tanggung jawab sosial? Apakah sekolah masih menjadi taman belajar, atau justru berubah menjadi ruang tekanan administratif? Apakah guru masih memiliki ruang untuk mendidik, atau semakin dibebani oleh laporan, prosedur, dan tuntutan birokratis?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut relevan dengan laporan UNESCO 2024/2025 tentang kepemimpinan pendidikan. Laporan itu menyoroti

pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pembelajaran dan mencatat bahwa dalam survei di 14 negara berpendapatan menengah, kepala sekolah menghabiskan sekitar 68% waktunya untuk tugas-tugas manajemen rutin. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa pemimpin pendidikan sering kali terlalu sibuk dengan administrasi sehingga waktu untuk membangun visi pembelajaran menjadi terbatas.

([UNESCO](#))

Dalam konteks Indonesia, tantangan serupa sering muncul. Kepala sekolah dituntut menjadi manajer administrasi, pengelola dana, pengawas guru, penghubung dengan pemerintah daerah, sekaligus pemimpin pembelajaran. Jika sistem tidak memberi dukungan yang memadai, kepala sekolah dapat terjebak dalam pekerjaan teknis dan kehilangan peran strategisnya sebagai pemimpin transformasi.

Karena itu, Hardiknas perlu dibaca sebagai kesempatan untuk mengembalikan pendidikan ke pusatnya: manusia. Pendidikan yang bermutu bukan hanya yang memiliki dokumen lengkap, tetapi yang mampu menghadirkan pengalaman belajar bermakna. Sekolah yang baik bukan hanya yang memiliki fasilitas bagus, tetapi yang membuat anak merasa aman, dihargai, tertantang, dan bertumbuh.

3. Tema Hardiknas 2025: Partisipasi Semesta

Tema “**Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua**” memiliki tiga gagasan utama: partisipasi, mutu, dan inklusi. Ketiganya saling terkait.

Pertama, **partisipasi** berarti keterlibatan aktif berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan. Partisipasi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kehadiran dalam upacara, donasi, atau kegiatan seremonial. Partisipasi yang sejati berarti kontribusi nyata dalam proses pendidikan: orang tua mendampingi anak belajar, masyarakat menjaga lingkungan sosial yang sehat, dunia usaha mendukung pengembangan keterampilan,

perguruan tinggi membantu riset dan inovasi, media menyebarkan informasi edukatif, dan pemerintah menciptakan kebijakan yang adil.

Kedua, **mutu** berarti kualitas proses dan hasil pendidikan. Mutu bukan hanya nilai ujian, melainkan kemampuan peserta didik untuk memahami, berpikir, mencipta, bekerja sama, mengambil keputusan etis, dan berkontribusi bagi masyarakat. Pendidikan bermutu juga mencakup kualitas guru, kurikulum, asesmen, sarana, kepemimpinan, budaya sekolah, serta relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata.

Ketiga, **untuk semua** berarti pendidikan harus inklusif. Pendidikan bermutu tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok yang tinggal di kota besar, memiliki akses digital, berasal dari keluarga mampu, atau bersekolah di lembaga unggulan. Pendidikan harus menjangkau anak di desa, daerah terpencil, keluarga miskin, penyandang disabilitas, anak pekerja, anak dari komunitas adat, dan kelompok rentan lainnya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa Hardiknas menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memajukan pendidikan nasional. Dalam pidato dan peringatan resmi, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menekankan bahwa usaha mewujudkan tujuan dan fungsi pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. ([Kemendikdasmen](#))

Di sinilah makna "semesta" menjadi penting. Kata "semesta" tidak hanya berarti banyak pihak, tetapi seluruh ekosistem. Pendidikan adalah ekologi sosial. Anak belajar bukan hanya di kelas, tetapi juga di rumah, jalan, gawai, tempat ibadah, komunitas, pasar, media sosial, dan lingkungan alam. Jika lingkungan sosial penuh kekerasan, kebencian, hoaks, konsumtivisme, atau keteladanan buruk, maka sekolah akan bekerja sendirian melawan arus. Sebaliknya, jika keluarga, masyarakat, media, dan teknologi ikut mendukung nilai-nilai pendidikan, maka sekolah akan memiliki medan sosial yang lebih kuat.

Dalam bahasa manajemen, pendidikan membutuhkan **stakeholder governance**. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran, tanggung jawab, dan kontribusi. Pemerintah menyediakan regulasi, pembiayaan, pemerataan, dan standar mutu. Sekolah mengelola proses belajar. Guru menjadi fasilitator pembelajaran. Orang tua menjadi mitra pendidikan. Komunitas menjadi ruang pembiasaan sosial. Dunia usaha menjadi jembatan antara pendidikan dan dunia kerja. Teknologi menjadi alat bantu, bukan pengganti nilai kemanusiaan.

4. Pendidikan Bermutu: Dari Akses Menuju Pembelajaran Bermakna

Selama beberapa dekade, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, berfokus pada perluasan akses pendidikan. Pembangunan sekolah, program wajib belajar, bantuan operasional, beasiswa, dan kebijakan afirmatif telah memperluas kesempatan anak untuk masuk sekolah. Namun, perluasan akses belum otomatis menghasilkan pembelajaran bermutu. Anak bisa hadir di sekolah, tetapi belum tentu memahami bacaan, menguasai numerasi dasar, atau memiliki kemampuan berpikir kritis.

Inilah yang sering disebut sebagai krisis pembelajaran. Bank Dunia dan UNESCO menggunakan indikator **learning poverty** untuk menggambarkan kondisi ketika anak tidak mampu membaca dan memahami teks sederhana pada usia akhir sekolah dasar. Dalam ringkasan Learning Poverty Indonesia 2024, Bank Dunia menempatkan isu ini sebagai bagian dari krisis pembelajaran yang masih perlu mendapat perhatian serius. ([World Bank](#))

Tantangan mutu juga tampak dari hasil PISA. Menurut data OECD untuk PISA 2022, skor rata-rata pelajar Indonesia usia 15 tahun adalah 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains; ketiganya berada di bawah rata-rata OECD, yaitu 472 untuk matematika, 476 untuk membaca, dan 485 untuk sains. ([OECD Education GPS](#))

Data tersebut tidak seharusnya dipakai untuk menyalahkan guru atau peserta didik. Ia harus dibaca sebagai cermin sistemik. Jika banyak anak belum mencapai kemampuan literasi dan numerasi yang kuat, maka pertanyaannya bukan hanya “mengapa murid kurang belajar?”, tetapi juga “apakah sistem pembelajaran sudah dirancang secara tepat?” Apakah guru mendapat pelatihan yang memadai? Apakah kurikulum terlalu padat? Apakah asesmen membantu pembelajaran atau hanya mengukur hafalan? Apakah sekolah di daerah tertinggal memiliki sumber daya yang setara? Apakah orang tua memiliki kapasitas mendukung anak belajar di rumah?

Pendidikan bermutu memerlukan pergeseran dari **schooling** menuju **learning**. Schooling berarti anak hadir secara formal di sekolah. Learning berarti anak benar-benar mengalami pertumbuhan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kesadaran. Dalam banyak kasus, sistem pendidikan terlalu sibuk memastikan kepatuhan administratif: daftar hadir, dokumen kurikulum, laporan kegiatan, foto acara, dan target formal. Hal-hal itu penting, tetapi tidak boleh mengalahkan pertanyaan utama: apakah anak belajar?

Pendidikan bermutu juga harus relevan dengan kehidupan. Anak-anak hari ini hidup dalam dunia digital, ekonomi kreatif, kecerdasan buatan, krisis lingkungan, dan perubahan sosial yang cepat. Mereka membutuhkan literasi membaca, numerasi, sains, teknologi, finansial, ekologis, budaya, dan etika. Mereka tidak cukup hanya menghafal definisi. Mereka harus mampu memahami masalah, menganalisis sebab, merancang solusi, bekerja dalam tim, dan menilai dampak moral dari keputusan.

Sebagai contoh, pembelajaran tentang lingkungan tidak cukup hanya menjelaskan definisi ekosistem. Murid dapat diajak mengamati sungai di sekitar sekolah, mengukur kualitas air sederhana, mewawancarai warga, membuat peta masalah, dan merancang kampanye kebersihan. Dalam proses itu, mereka belajar sains, bahasa, matematika, kewargaan, teknologi, dan karakter sekaligus. Itulah pembelajaran bermakna.

5. Partisipasi Keluarga dalam Pendidikan

Keluarga adalah sekolah pertama. Sebelum anak mengenal guru, buku, dan kelas, ia terlebih dahulu belajar dari orang tua atau pengasuhnya. Anak belajar bahasa, emosi, nilai, kebiasaan, dan cara memandang dunia dari lingkungan keluarga. Karena itu, kualitas pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari kualitas pengasuhan keluarga.

Partisipasi keluarga bukan berarti orang tua harus menggantikan guru. Orang tua tidak harus menguasai semua mata pelajaran. Namun, orang tua dapat membangun suasana rumah yang mendukung belajar: menyediakan waktu untuk berdialog, membacakan cerita, membatasi penggunaan gawai secara bijak, membangun disiplin, memberi teladan kejujuran, dan menunjukkan penghargaan terhadap ilmu.

Dalam konteks masyarakat modern, banyak orang tua menghadapi tekanan ekonomi dan waktu. Mereka bekerja panjang, menghadapi kemacetan, tuntutan digital, dan kecemasan finansial. Akibatnya, pendampingan anak sering diserahkan sepenuhnya kepada sekolah atau perangkat digital. Di sinilah pentingnya literasi pengasuhan. Sekolah dapat membangun komunikasi yang sehat dengan orang tua, bukan hanya memanggil mereka ketika anak bermasalah, tetapi melibatkan mereka dalam proses belajar.

Misalnya, sekolah dapat mengadakan forum orang tua bulanan yang tidak sekadar membahas iuran atau kegiatan seremonial, tetapi membicarakan cara mendampingi anak membaca, mengelola emosi remaja, mencegah perundungan, menggunakan internet secara aman, dan membangun motivasi belajar. Dengan demikian, orang tua menjadi mitra pedagogis, bukan hanya penyedia biaya.

Keluarga juga berperan dalam membentuk karakter digital. Anak-anak kini tumbuh bersama gawai. Mereka belajar dari YouTube, TikTok, gim, media sosial, dan kecerdasan buatan. Jika keluarga tidak hadir, anak dapat dibentuk oleh algoritma tanpa filter nilai. Orang tua tidak harus menjadi

ahli teknologi, tetapi perlu memahami prinsip dasar: apa yang ditonton anak, dengan siapa ia berinteraksi, berapa lama ia menggunakan gawai, dan nilai apa yang ia serap.

Partisipasi keluarga dalam pendidikan bermutu berarti membangun jembatan antara rumah dan sekolah. Ketika nilai yang diajarkan di sekolah diperkuat di rumah, pembelajaran menjadi lebih kokoh. Sebaliknya, ketika sekolah mengajarkan kejujuran tetapi keluarga membenarkan kecurangan kecil, anak menerima pesan moral yang bertentangan. Karena itu, pendidikan karakter harus menjadi proyek bersama.

6. Peran Guru sebagai Jantung Pendidikan

Tidak ada pendidikan bermutu tanpa guru bermutu. Kurikulum dapat berubah, teknologi dapat berkembang, dan gedung sekolah dapat diperbarui, tetapi hubungan guru dan murid tetap menjadi pusat pendidikan. Guru bukan hanya penyampai materi, melainkan pembentuk pengalaman belajar.

Dalam dunia yang dipenuhi informasi, fungsi guru berubah. Dulu, guru sering dipandang sebagai sumber utama pengetahuan. Kini, murid dapat memperoleh informasi dari internet dalam hitungan detik. Namun, justru karena informasi melimpah, peran guru semakin penting sebagai penuntun berpikir. Guru membantu murid membedakan fakta dan opini, memahami konteks, menghubungkan konsep, menguji argumen, serta membangun sikap etis.

Guru abad ke-21 harus menjadi **learning designer**. Ia merancang pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, kolaboratif, dan reflektif. Guru tidak hanya bertanya, "materi apa yang harus saya sampaikan?", tetapi "pengalaman belajar apa yang perlu dialami murid agar ia memahami konsep ini?" Pertanyaan kedua jauh lebih mendalam.

Misalnya, dalam pelajaran ekonomi, guru tidak hanya menjelaskan hukum permintaan dan penawaran secara abstrak. Ia dapat meminta murid mengamati harga cabai di pasar lokal, mewawancarai pedagang, mengumpulkan data cuaca, melihat biaya transportasi, lalu mendiskusikan mengapa harga berubah. Dengan cara ini, murid belajar bahwa teori ekonomi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Guru juga harus menjadi penjaga kemanusiaan di tengah digitalisasi. Teknologi dapat membantu personalisasi belajar, menyediakan sumber daya, dan memperluas akses. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan empati guru. Seorang murid yang kehilangan semangat belajar sering kali tidak membutuhkan aplikasi baru, melainkan guru yang memperhatikan, mendengarkan, dan percaya bahwa ia mampu.

Dalam kerangka Hardiknas 2025, partisipasi semesta harus dimulai dengan penghormatan nyata kepada guru. Penghormatan bukan hanya dalam bentuk slogan, melainkan dukungan profesional: pelatihan bermutu, beban administrasi yang wajar, kesejahteraan, komunitas belajar guru, akses teknologi, dan ruang untuk berinovasi. Guru yang terlalu lelah oleh administrasi akan sulit menjadi pendidik kreatif.

7. Kepemimpinan Sekolah dan Budaya Belajar

Sekolah bermutu membutuhkan kepemimpinan yang bermutu. Kepala sekolah bukan sekadar administrator, melainkan pemimpin pembelajaran. Ia bertanggung jawab membangun visi, budaya, kolaborasi, dan sistem yang mendukung guru serta murid.

Kepemimpinan sekolah yang baik memiliki beberapa ciri. Pertama, berorientasi pada pembelajaran. Semua kebijakan sekolah harus kembali pada pertanyaan: apakah ini meningkatkan kualitas belajar murid? Kedua, berbasis data. Kepala sekolah perlu memahami data kehadiran, hasil asesmen, kebutuhan guru, kondisi sosial murid, dan umpan balik orang tua. Ketiga, kolaboratif. Kepala sekolah tidak bekerja sendiri, tetapi membangun

tim guru, komite sekolah, dan jejaring masyarakat. Keempat, etis. Sekolah adalah lembaga moral; kepemimpinan yang koruptif, diskriminatif, atau otoriter akan merusak nilai pendidikan.

UNESCO menekankan bahwa kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam pelaksanaan reformasi, tetapi pemimpin sekolah sering menghadapi tuntutan yang terlalu banyak. Laporan GEM 2024/2025 membahas bagaimana kepemimpinan yang baik berkontribusi pada hasil pendidikan dan bagaimana visi, praktik, serta konteks memengaruhi efektivitas kepemimpinan. ([UNESCO](#))

Budaya sekolah juga sangat penting. Dua sekolah dengan fasilitas sama dapat menghasilkan pengalaman belajar berbeda karena budaya yang berbeda. Sekolah dengan budaya takut akan membuat murid pasif. Sekolah dengan budaya dialog akan membuat murid berani bertanya. Sekolah dengan budaya kompetisi ekstrem dapat membuat sebagian anak merasa gagal. Sekolah dengan budaya pertumbuhan akan melihat kesalahan sebagai bagian dari belajar.

Dalam konteks Indonesia, budaya sekolah yang baik perlu menggabungkan nilai lokal dan kompetensi global. Nilai gotong royong, hormat kepada sesama, musyawarah, dan kepedulian sosial dapat dikembangkan bersama literasi digital, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kewargaan global. Pendidikan yang baik tidak membuat anak tercerabut dari budaya sendiri, tetapi juga tidak menutup diri dari dunia.

8. Pendidikan Inklusif dan Keadilan Sosial

Frasa “untuk semua” dalam tema Hardiknas 2025 menuntut perhatian serius terhadap keadilan pendidikan. Pendidikan bermutu tidak boleh menjadi hak istimewa. Jika hanya anak-anak dari keluarga mampu yang memperoleh sekolah baik, guru baik, bimbingan belajar, internet cepat, dan lingkungan belajar kondusif, maka pendidikan justru dapat memperlebar ketimpangan.

Pendidikan inklusif memiliki dua dimensi. Pertama, inklusi akses, yaitu memastikan semua anak dapat masuk dan bertahan di sekolah. Kedua, inklusi mutu, yaitu memastikan semua anak memperoleh pembelajaran yang baik. Sering kali negara berhasil memperluas akses, tetapi mutu masih timpang. Anak di kota besar mungkin memiliki laboratorium, perpustakaan, internet, dan guru lengkap. Anak di daerah terpencil mungkin belajar dengan fasilitas terbatas dan kekurangan guru.

Keadilan pendidikan tidak berarti semua sekolah harus identik. Indonesia sangat beragam. Namun, setiap anak harus memperoleh standar minimum yang layak: guru kompeten, ruang belajar aman, bahan ajar memadai, akses literasi, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan mengembangkan potensi.

Pendidikan inklusif juga mencakup anak berkebutuhan khusus. Banyak anak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan fisik, sosial, dan pedagogis. Sekolah inklusif bukan hanya menerima anak disabilitas secara administratif, tetapi menyediakan dukungan yang sesuai: aksesibilitas, guru pendamping, metode pembelajaran adaptif, dan budaya teman sebaya yang menghargai perbedaan.

Selain itu, inklusi juga menyangkut gender, kemiskinan, bahasa ibu, komunitas adat, dan daerah 3T. Anak-anak dari komunitas lokal sering memiliki pengetahuan ekologis, budaya, dan bahasa yang kaya. Pendidikan seharusnya tidak menghapus identitas mereka, melainkan menjadikannya sumber belajar. Kurikulum yang peka konteks dapat membuat anak merasa bahwa sekolah menghargai kehidupannya.

Dalam kerangka partisipasi semesta, keadilan pendidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Pemerintah daerah, tokoh adat, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan dunia usaha dapat bersama-sama mendukung sekolah yang paling membutuhkan. Pendidikan bermutu untuk semua berarti yang kuat membantu yang lemah, yang maju mendampingi yang tertinggal, dan yang memiliki sumber daya berbagi dengan yang kekurangan.

9. Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan

Pendidikan abad ke-21 tidak dapat menghindari teknologi. Digitalisasi telah mengubah cara manusia mencari informasi, berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Kecerdasan buatan generatif, termasuk chatbot, sistem rekomendasi, penerjemah otomatis, dan alat bantu penulisan, telah memasuki ruang pendidikan. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi akan masuk ke sekolah, melainkan bagaimana teknologi digunakan secara tepat, etis, dan adil.

UNESCO dalam Global Education Monitoring Report 2023 menekankan bahwa teknologi dalam pendidikan harus dinilai melalui lensa relevansi, pemerataan, skalabilitas, dan keberlanjutan. Artinya, teknologi bukan tujuan, melainkan alat. Penggunaan teknologi harus menjawab kebutuhan pembelajaran, tidak memperlebar ketimpangan, dapat diterapkan secara realistis, dan berkelanjutan secara sosial maupun finansial. ([UNESCO](#))

Dalam konteks Hardiknas 2025, teknologi dapat mendukung pendidikan bermutu melalui beberapa cara. Pertama, memperluas akses sumber belajar. Murid di daerah terpencil dapat memperoleh materi digital, video pembelajaran, perpustakaan daring, dan simulasi interaktif. Kedua, membantu guru merancang pembelajaran. Guru dapat menggunakan AI untuk membuat variasi soal, rubrik penilaian, bahan bacaan bertingkat, atau ide proyek. Ketiga, mendukung personalisasi. Sistem digital dapat membantu mengidentifikasi kesulitan belajar murid dan menyediakan latihan sesuai kebutuhan. Keempat, memperkuat manajemen sekolah melalui data.

Namun, teknologi juga membawa risiko. Pertama, kesenjangan digital. Anak yang memiliki perangkat dan internet stabil akan lebih diuntungkan dibanding anak yang tidak memiliki akses. Kedua, risiko plagiarisme dan ketergantungan. Jika AI digunakan tanpa etika, murid dapat menyerahkan tugas tanpa berpikir. Ketiga, bias informasi. Algoritma dapat membawa

bias budaya, bahasa, atau ideologi tertentu. Keempat, melemahnya interaksi manusia. Pembelajaran digital yang berlebihan dapat mengurangi relasi sosial, empati, dan dialog.

Karena itu, literasi digital harus menjadi bagian inti pendidikan. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat, tetapi kemampuan memahami, mengevaluasi, mencipta, dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Murid perlu belajar memverifikasi informasi, menjaga privasi, memahami jejak digital, menghindari perundungan daring, dan menggunakan AI sebagai alat bantu berpikir, bukan pengganti berpikir.

Guru juga memerlukan literasi AI. Mereka perlu memahami batas dan potensi AI: AI dapat membantu menyusun ide, tetapi bisa menghasilkan informasi keliru; AI dapat mempercepat pekerjaan, tetapi tidak menggantikan penilaian pedagogis; AI dapat memberi umpan balik awal, tetapi tidak menggantikan kepekaan manusia. Pendidikan bermutu di era AI harus menghasilkan manusia yang lebih manusiawi, bukan sekadar lebih teknis.

10. Pendidikan Karakter dan Krisis Nilai

Pendidikan bermutu tidak boleh direduksi menjadi capaian akademik. Bangsa yang cerdas secara teknis tetapi miskin karakter akan menghadapi krisis moral. Korupsi, kekerasan, intoleransi, perundungan, manipulasi informasi, dan kerusakan lingkungan tidak dapat diatasi hanya dengan kecerdasan kognitif. Diperlukan pendidikan karakter yang hidup dalam praktik.

Pendidikan karakter sering gagal ketika hanya menjadi slogan. Nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan toleransi tidak cukup ditempel di dinding sekolah. Nilai harus dialami dalam budaya sekolah. Jika sekolah menuntut kejujuran tetapi membiarkan kecurangan akademik, maka murid belajar bahwa nilai hanyalah formalitas. Jika sekolah

mengajarkan toleransi tetapi membiarkan ejekan terhadap perbedaan, maka pendidikan karakter kehilangan makna.

Dalam tradisi Ki Hadjar Dewantara, pendidikan karakter terkait dengan budi pekerti. Budi pekerti bukan sekadar moralitas individual, tetapi keselarasan cipta, rasa, karsa, dan tindakan. Anak didik bukan hanya untuk mengetahui yang baik, tetapi mencintai yang baik dan melakukan yang baik. Ini sejalan dengan pandangan pendidikan modern bahwa karakter terbentuk melalui pembiasaan, keteladanan, dialog moral, dan pengalaman sosial.

Pendidikan karakter juga harus relevan dengan tantangan zaman. Di era digital, kejujuran berarti tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memanipulasi identitas. Tanggung jawab berarti menggunakan teknologi secara bijak. Empati berarti tidak melakukan perundungan daring. Keadilan berarti tidak mendiskriminasi kelompok rentan. Kepedulian ekologis berarti memahami dampak konsumsi terhadap lingkungan.

Contoh konkret dapat ditemukan dalam proyek pembelajaran berbasis masalah. Murid diajak mengidentifikasi masalah sampah plastik di sekolah. Mereka mengumpulkan data, berdiskusi, membuat kampanye, merancang tempat sampah terpilah, bekerja sama dengan petugas kebersihan, dan mengevaluasi hasil. Dalam proyek ini, murid belajar sains, matematika, komunikasi, manajemen, dan karakter. Mereka tidak hanya diberi ceramah tentang tanggung jawab; mereka mempraktikkannya.

11. Pendidikan dan Dunia Kerja Masa Depan

Pendidikan bermutu harus mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja yang berubah. Revolusi industri, otomasi, platform digital, ekonomi kreatif, dan kecerdasan buatan mengubah jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Banyak pekerjaan rutin akan tergantikan

teknologi, sementara pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, analisis kompleks, kepemimpinan, dan kolaborasi akan semakin penting.

Namun, pendidikan tidak boleh semata-mata menjadi pelayan pasar kerja. Tujuan pendidikan lebih luas daripada menghasilkan tenaga kerja.

Pendidikan harus membentuk manusia utuh: pekerja yang kompeten, warga negara yang bertanggung jawab, pribadi yang berkarakter, dan anggota masyarakat yang peduli. Dengan demikian, hubungan pendidikan dan dunia kerja harus seimbang. Sekolah perlu relevan dengan kebutuhan ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan misi kemanusiaannya.

Pendidikan vokasi, misalnya, perlu diperkuat melalui kemitraan dengan industri. Namun, kemitraan itu tidak boleh hanya mengajarkan keterampilan teknis jangka pendek. Peserta didik juga perlu belajar problem solving, komunikasi, keselamatan kerja, etika profesional, kewirausahaan, dan adaptasi teknologi. Dunia usaha dapat berperan dalam menyediakan magang, mentor, kurikulum bersama, peralatan, dan informasi kebutuhan kompetensi.

Perguruan tinggi juga memiliki peran besar. Mereka dapat mendampingi sekolah, melatih guru, melakukan riset pendidikan, mengembangkan teknologi pembelajaran, dan membantu pemerintah daerah memetakan masalah pendidikan. Dalam semangat partisipasi semesta, perguruan tinggi tidak boleh terpisah dari pendidikan dasar dan menengah. Ekosistem pendidikan harus terhubung dari PAUD hingga perguruan tinggi.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, pendidikan menjadi fondasi bonus demografi. Bonus demografi hanya menjadi berkah jika penduduk usia produktif memiliki pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan karakter. Jika tidak, bonus demografi dapat berubah menjadi beban sosial. Karena itu, Hardiknas 2025 harus ditempatkan dalam agenda pembangunan manusia jangka panjang.

12. Pembelajaran Berbasis Komunitas dan Kearifan Lokal

Partisipasi semesta juga berarti mengakui bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah formal. Komunitas lokal memiliki pengetahuan, nilai, dan praktik yang dapat memperkaya pembelajaran. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa: gotong royong, musyawarah, kearifan ekologis, seni, bahasa daerah, tradisi pertanian, pengetahuan laut, dan sistem sosial lokal.

Pendidikan bermutu seharusnya tidak memisahkan anak dari lingkungannya. Sebaliknya, sekolah dapat menjadikan lingkungan lokal sebagai laboratorium belajar. Di desa pertanian, murid dapat belajar biologi, ekonomi, iklim, dan kewirausahaan melalui pengamatan sawah. Di daerah pesisir, murid dapat belajar ekologi laut, cuaca, rantai pasok ikan, dan konservasi. Di wilayah perkotaan, murid dapat belajar transportasi, polusi, tata kota, dan ekonomi informal.

Kearifan lokal juga dapat memperkuat karakter. Nilai gotong royong, solidaritas, hormat kepada orang tua, dan keseimbangan dengan alam dapat menjadi basis pendidikan karakter. Namun, kearifan lokal perlu dibaca secara kritis. Tidak semua praktik lama harus dipertahankan jika bertentangan dengan keadilan, kesetaraan, atau hak anak. Pendidikan harus mampu merawat tradisi yang membebaskan dan mereformasi tradisi yang membatasi.

Contoh pembelajaran berbasis komunitas dapat berupa proyek "sejarah kampung." Murid mewawancarai tokoh masyarakat, mengumpulkan foto lama, memetakan perubahan lingkungan, menulis narasi sejarah lokal, dan mempresentasikan hasilnya kepada warga. Dalam proyek ini, murid belajar bahasa, sejarah, teknologi, seni, dan kewargaan. Mereka juga belajar menghargai identitas lokal.

Pendidikan yang berakar pada komunitas membuat murid merasa bahwa belajar bukan kegiatan asing. Sekolah tidak menjadi menara gading, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat. Inilah salah satu makna terdalam dari partisipasi semesta.

13. Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua, diperlukan tata kelola kolaboratif. Tata kelola pendidikan tidak cukup hanya berbasis instruksi dari pusat. Indonesia terlalu luas dan beragam. Kebijakan nasional penting untuk menetapkan arah dan standar, tetapi implementasi membutuhkan adaptasi lokal.

Tata kelola kolaboratif mencakup beberapa prinsip. Pertama, **kejelasan peran**. Setiap pihak harus memahami tanggung jawabnya. Pemerintah pusat menyusun regulasi dan standar nasional. Pemerintah daerah memastikan layanan pendidikan berjalan. Sekolah mengelola pembelajaran. Komite sekolah menjembatani partisipasi masyarakat. Dunia usaha mendukung relevansi keterampilan. Perguruan tinggi membantu riset dan pengembangan.

Kedua, **transparansi dan akuntabilitas**. Dana pendidikan, program sekolah, hasil asesmen, dan kebijakan harus dikelola secara terbuka. Transparansi membangun kepercayaan. Tanpa kepercayaan, partisipasi masyarakat akan lemah.

Ketiga, **berbasis data**. Keputusan pendidikan harus didukung data, tetapi data harus digunakan untuk perbaikan, bukan sekadar hukuman. Data kehadiran, capaian belajar, kondisi sosial, dan kebutuhan guru dapat membantu sekolah merancang intervensi. Namun, data yang berlebihan juga dapat membebani guru jika tidak dikelola dengan bijak.

Keempat, **fokus pada pembelajaran**. Banyak program pendidikan gagal karena terlalu banyak kegiatan tetapi sedikit dampak. Sekolah dapat sibuk mengikuti lomba, seremoni, pelatihan, dan administrasi, tetapi pembelajaran di kelas tidak berubah. Tata kelola yang baik harus menjaga agar semua program kembali pada tujuan utama: murid belajar lebih baik.

Kelima, **keberlanjutan**. Program pendidikan tidak boleh bergantung pada satu figur atau satu periode kebijakan. Diperlukan sistem yang terus berjalan meskipun pemimpin berganti. Pendidikan adalah investasi jangka panjang; hasilnya sering baru terlihat dalam satu generasi.

14. Narasi Kasus: Sekolah sebagai Pusat Partisipasi Semesta

Untuk menjelaskan gagasan ini secara konkret, bayangkan sebuah SMP negeri di pinggiran kota. Sekolah tersebut memiliki siswa dari latar belakang ekonomi beragam. Sebagian orang tua bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, sopir, dan pekerja informal. Sekolah menghadapi masalah rendahnya minat baca, penggunaan gawai berlebihan, keterlambatan siswa, dan hasil numerasi yang belum memuaskan.

Dalam pendekatan lama, sekolah mungkin hanya menambah jam pelajaran, memberi hukuman, atau menekan guru agar mengejar target. Namun, dalam semangat Hardiknas 2025, sekolah memilih pendekatan partisipasi semesta.

Kepala sekolah mengundang guru, komite sekolah, orang tua, perpustakaan daerah, karang taruna, puskesmas, dan pelaku UMKM lokal. Mereka berdiskusi berdasarkan data sederhana: hasil asesmen membaca, kehadiran siswa, survei kebiasaan belajar, dan wawancara guru. Dari diskusi itu muncul beberapa program.

Pertama, gerakan membaca 15 menit sebelum pelajaran, tetapi dengan buku yang dipilih murid. Kedua, orang tua diminta mendampingi anak membaca minimal dua kali seminggu dan menandatangani jurnal sederhana, bukan sebagai beban administratif, tetapi sebagai komunikasi keluarga. Ketiga, perpustakaan daerah menyediakan pojok baca keliling. Keempat, pelaku UMKM lokal menjadi narasumber proyek matematika tentang biaya produksi dan harga jual. Kelima, puskesmas memberi edukasi tentang tidur, gizi, dan kesehatan mental remaja. Keenam, guru

menggunakan AI secara terbatas untuk membuat bahan bacaan bertingkat sesuai kemampuan murid.

Setelah enam bulan, perubahan mulai terlihat. Murid lebih sering meminjam buku. Guru memiliki data kemajuan membaca. Orang tua lebih sering berkomunikasi dengan wali kelas. Proyek matematika membuat murid memahami bahwa numerasi berkaitan dengan kehidupan ekonomi keluarga. Sekolah belum sempurna, tetapi budaya belajar mulai berubah.

Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pendidikan bermutu tidak selalu dimulai dari program besar. Ia dapat dimulai dari kolaborasi lokal, data sederhana, kepemimpinan yang terbuka, dan komitmen bersama. Inilah makna operasional partisipasi semesta.

15. Tantangan Implementasi

Meskipun tema Hardiknas 2025 sangat kuat, implementasinya tidak mudah. Ada beberapa tantangan utama.

Pertama, **kesenjangan sumber daya**. Tidak semua sekolah memiliki guru cukup, fasilitas memadai, internet stabil, atau dukungan masyarakat. Program yang berhasil di kota besar belum tentu dapat diterapkan langsung di daerah terpencil.

Kedua, **beban administrasi**. Guru dan kepala sekolah sering menghadapi banyak tuntutan laporan. Jika tidak disederhanakan, administrasi dapat mengurangi waktu dan energi untuk pembelajaran.

Ketiga, **fragmentasi kebijakan**. Pendidikan melibatkan banyak lembaga dan level pemerintahan. Jika koordinasi lemah, program dapat tumpang tindih atau tidak berkelanjutan.

Keempat, **ketimpangan digital**. Transformasi digital dapat memperluas akses, tetapi juga memperlebar jurang antara yang memiliki perangkat dan yang tidak. Kebijakan teknologi pendidikan harus memperhatikan keadilan akses.

Kelima, **resistensi perubahan**. Guru, orang tua, dan birokrasi pendidikan dapat merasa nyaman dengan pola lama. Perubahan membutuhkan komunikasi, pelatihan, dukungan, dan waktu.

Keenam, **komersialisasi pendidikan**. Pendidikan bermutu sering disalahartikan sebagai pendidikan mahal. Padahal mutu harus menjadi hak semua anak. Jika mutu hanya tersedia melalui sekolah mahal, maka pendidikan kehilangan fungsi keadilan sosial.

Ketujuh, **krisis keteladanan**. Pendidikan karakter sulit berhasil jika masyarakat luas menampilkan contoh buruk: korupsi, kekerasan, ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan intoleransi. Sekolah tidak dapat bekerja sendiri membentuk karakter jika ruang publik tidak mendukung nilai yang sama.

Menghadapi tantangan ini, partisipasi semesta harus bersifat realistis. Tidak cukup membuat slogan. Diperlukan peta jalan, indikator, dukungan anggaran, pelatihan guru, penyederhanaan administrasi, kemitraan lokal, dan evaluasi berkelanjutan.

16. Rekomendasi Strategis

Untuk menerjemahkan tema Hardiknas 2025 menjadi gerakan nyata, beberapa rekomendasi dapat diajukan.

Pertama, **menjadikan literasi dan numerasi sebagai fondasi nasional**. Semua sekolah perlu memastikan bahwa setiap anak mampu membaca, memahami, menulis, berhitung, dan berpikir logis. Tanpa fondasi ini, pembelajaran tingkat lanjut akan rapuh.

Kedua, **memperkuat guru sebagai profesional pembelajar**. Pelatihan guru harus praktis, berkelanjutan, berbasis komunitas, dan terkait langsung dengan masalah kelas. Guru perlu ruang kolaborasi, bukan hanya seminar satu arah.

Ketiga, **mengurangi beban administrasi yang tidak berdampak langsung pada pembelajaran.** Sistem pelaporan harus sederhana, digital secara bijak, dan tidak menjadikan guru sebagai pekerja administratif semata.

Keempat, **membangun kemitraan sekolah-keluarga-komunitas.** Setiap sekolah dapat memiliki program partisipasi orang tua dan komunitas yang sesuai konteks lokal. Komite sekolah sebaiknya tidak hanya membahas dana, tetapi juga mutu pembelajaran.

Kelima, **menggunakan teknologi secara etis dan inklusif.** Pemerintah dan sekolah perlu memastikan akses perangkat, koneksi, pelatihan, dan pedoman etika penggunaan AI. Teknologi harus membantu guru dan murid, bukan menciptakan beban baru.

Keenam, **mengembangkan kurikulum kontekstual.** Pembelajaran perlu menghubungkan konsep akademik dengan masalah nyata di sekitar murid: lingkungan, ekonomi lokal, budaya, kesehatan, teknologi, dan kewargaan.

Ketujuh, **memperkuat kepemimpinan sekolah.** Kepala sekolah perlu dilatih sebagai pemimpin pembelajaran, bukan hanya administrator. Evaluasi kepala sekolah sebaiknya menilai kemampuan membangun budaya belajar, mendukung guru, dan meningkatkan hasil murid.

Kedelapan, **membangun sistem akuntabilitas yang manusiawi.** Evaluasi pendidikan harus digunakan untuk perbaikan, bukan sekadar pemeringkatan. Sekolah yang tertinggal perlu didampingi, bukan dipermalukan.

Kesembilan, **memperkuat pendidikan karakter melalui budaya sekolah.** Nilai harus hidup dalam praktik harian: cara guru berbicara, cara konflik diselesaikan, cara murid didengar, dan cara sekolah memperlakukan perbedaan.

Kesepuluh, **menempatkan pendidikan sebagai investasi peradaban.**

Kebijakan pendidikan harus melampaui siklus politik jangka pendek.

Pendidikan membutuhkan konsistensi lintas generasi.

17. Kesimpulan

Hari Pendidikan Nasional 2025 dengan tema **“Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”** merupakan ajakan penting untuk memandang pendidikan sebagai gerakan bersama. Tema ini menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat diserahkan hanya kepada negara atau sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab seluruh ekosistem bangsa: keluarga, masyarakat, guru, kepala sekolah, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, komunitas lokal, dan peserta didik.

Makalah ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Indonesia bukan hanya akses, tetapi mutu pembelajaran, pemerataan kualitas, kepemimpinan sekolah, literasi digital, karakter, dan relevansi dengan masa depan. Data internasional seperti PISA dan laporan UNESCO memperlihatkan bahwa mutu pendidikan harus terus diperkuat melalui pendekatan sistemik, bukan solusi parsial.

Partisipasi semesta berarti membangun tata kelola pendidikan yang kolaboratif, transparan, berbasis data, dan berpusat pada murid.

Pendidikan bermutu berarti pembelajaran yang membuat anak mampu membaca dunia, memahami dirinya, menghargai sesama, menggunakan teknologi secara etis, dan berkontribusi bagi masyarakat. Pendidikan untuk semua berarti tidak ada anak yang tertinggal karena kemiskinan, lokasi, disabilitas, gender, bahasa, atau latar sosial.

Dalam semangat Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus menuntun manusia menuju kemerdekaan, kebahagiaan, dan tanggung jawab sosial. Hardiknas 2025 seharusnya tidak berhenti pada upacara, logo, atau infografik. Ia harus menjadi gerakan nyata untuk menghidupkan kembali pendidikan sebagai kerja kebudayaan. Jika seluruh unsur bangsa

mengambil bagian, maka pendidikan Indonesia dapat bergerak dari sekadar sistem persekolahan menuju ekosistem pembelajaran nasional yang adil, bermutu, manusiawi, dan relevan dengan masa depan.

Glosarium

Asesmen

Proses pengumpulan informasi tentang capaian, kebutuhan, dan perkembangan belajar peserta didik untuk mendukung perbaikan pembelajaran.

Digitalisasi Pendidikan

Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung akses, proses, manajemen, dan evaluasi pendidikan.

Hardiknas

Hari Pendidikan Nasional, diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai momentum refleksi pendidikan Indonesia.

Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence

Teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, mengenali pola, memberi rekomendasi, dan menghasilkan teks.

Kepemimpinan Pembelajaran

Kepemimpinan sekolah yang berfokus pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar murid.

Ki Hadjar Dewantara

Tokoh pendidikan nasional Indonesia yang pemikirannya menjadi fondasi penting bagi pendidikan nasional.

Learning Poverty

Kondisi ketika anak tidak mampu membaca dan memahami teks sederhana pada usia akhir sekolah dasar.

Literasi Digital

Kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, mencipta, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.

Numerasi

Kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan.

Partisipasi Semesta

Keterlibatan seluruh unsur ekosistem pendidikan—pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan peserta didik—dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pendidikan Bermutu

Pendidikan yang menghasilkan pembelajaran bermakna, karakter kuat, keterampilan relevan, dan kesempatan berkembang bagi semua peserta didik.

Pendidikan Inklusif

Pendidikan yang memberi kesempatan adil bagi semua anak, termasuk kelompok rentan dan anak berkebutuhan khusus.

PISA

Programme for International Student Assessment, asesmen internasional oleh OECD untuk mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains.

Transformasi Pendidikan

Perubahan mendasar dalam tujuan, proses, tata kelola, budaya, dan teknologi pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Daftar Pustaka APA 7

Bank Dunia. (2024). *Indonesia learning poverty brief 2024*. World Bank.

Dewantara, K. H. (2004). *Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Kemendikdasmen terbitkan pedoman pelaksanaan Hardiknas 2025*.

Kemendikdasmen. ([Kemendikdasmen](#))

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Hardiknas 2025: Mendikdasmen serukan partisipasi semesta untuk pendidikan nasional*. Kemendikdasmen. ([Kemendikdasmen](#))

OECD. (2023). *PISA 2022 results: Indonesia country note*. Organisation for Economic Co-operation and Development. ([OECD](#))

OECD. (2024). *Education GPS: Indonesia—student performance, PISA 2022*. Organisation for Economic Co-operation and Development. ([OECD Education GPS](#))

UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* UNESCO. ([UNESCO](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Hari Pendidikan Nasional: Partisipasi Semesta
untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu bagi Semua*

UNESCO. (2024). *Global Education Monitoring Report 2024/5: Leadership in education—Lead for learning*. UNESCO. ([UNESCO](#))

UNESCO. (2024). *Leadership in education*. Global Education Monitoring Report. ([UNESCO](#))

World Bank. (2024). *Indonesia learning poverty brief*. World Bank. ([World Bank](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 2 Mei 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69f6d64e-35ec-83a0-85a6-57dbff2ec226>